

**TESIS**

**PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP MUTU SUMBER DAYA**

**MANUSIA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

**THE EFFECT OF REGIONAL EXPENDITURE ON HUMAN  
RESOURCES QUALITY IN EASTREN REGION OF INDONESIA**

**MUH. FAIZAL AZIS**

**A052201006**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA**

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**



**TESIS**

**PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP MUTU SUMBER DAYA**

**MANUSIA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

**THE EFFECT OF REGIONAL EXPENDITURE ON HUMAN  
RESOURCES QUALITY IN EASTREN REGION OF INDONESIA**

Di susun dan di ajukan oleh:

**MUH. FAIZAL AZIS**

**A052201006**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA**

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**



**TESIS**

**PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP MUTU SUMBER DAYA MANUSIA  
DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. FAIZAL AZIS**  
A052201006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian  
Studi Program Magister **Ekonomi Sumber Daya**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin


pada tanggal **20 November 2023**


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

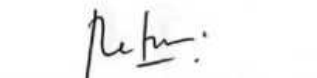
Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Abd. Rahman Razak, S.E., MS.**  
NIP. 196312311992031021

  
**Dr. Fatmawati, S.E., M.Si., CWM®**  
NIP. 196401061988032001

Ketua Program Studi Magister  
Ekonomi Sumber Daya,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,

  
**Dr. Retno Filtrianti, S.E., MSI, CWM®**  
NIP. 196510121999032001

  
**Prof. Dr. Abdy Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM**  
NIP. 196402051988101001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. FAIZAL AZIS

Nim : A052201006

Program Studi : Magister Ekonomi Sumber Daya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa tesis yang berjudul : **"Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Mutu Sumber Daya Manusia Di Kawasan Timur Indonesia"** adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan dari tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 November 2023

Yang menyatakan,



Muh. Faizal Azis



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas nafas kehidupannya dan Nabi Muhammad SAW atas risalahnya karena dengan rahmat dan hidayahnyalah sehingga kendala teknis maupun non teknis dalam penyelesaian tesis ini dapat terlewati dan akhirnya selesai sesuai dengan harapan.

Tesis ini yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir Magister pada Program Study Ekonomi Sumber Daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Judul tesis yang penulis susun adalah **“Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Mutu Sumber Daya Manusia Di Kawasan Timur Indonesia”** Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang ada maka penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak.

Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima  
pada pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan semangat,  
n dan saran-saran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Rasa terima  
ngin penulis sampaikan terutama kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Retno Fitrianti, S.E., M.Si., CWM selaku Ketua Jurusan Magister Ekonomi Sumber Daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Abd. Rahmman Razak, S.E., MS. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Fatmawati, S.E., M.Si., CWM selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Untuk Tim Penguji Bapak Dr. Madris, S.E., DPS., M.Si., CWM. Bapak Dr. Sabir S.E., M.Si., CWM. Ibu Dr. Retno Fitrianti, S.E., M.Si., CWM.
6. Seluruh Dosen , Staf akademik, staf Jurusan Ekonomi Sumber Daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Abd. Azis dan Ibunda tercinta Nurjannah, Saudara dan Semua keluarga yang selalu memberikan doanya, ngannya, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan tesis ini.



8. Untuk semua sahabat dan teman terbaikku yang terus memompa semangat untuk terus menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan bagi penulis khususnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberikan berkahnya dan imbalannya yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Makassar, 28 November 2023

Muh. Faizal Azis



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

MUH. FAIZAL AZIS. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Mutu Sumber Daya Manusia di Kawasan Timur (dibimbing oleh Abd, Rahman Razak dan Fatmawati).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu ,belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap variabel terikat dalam hal ini mutu sumber daya. Dengan penelitian ini, akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Adapun lokasi penelitian ini, yaitu 17 provinsi yang berada dalam Kawasan Timur Indonesia yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Wilayah Timur Indonesia, yakni provinsi yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Data yang digunakan adalah data panel. Data panel merupakan gabungan antara data antartempat (*cross section*) dan data antarwaktu (*time series*). Dalam penelitian ini *cross section* yang digunakan sebanyak 17 provinsi yang berada di kawasan Timur Indonesia dan terkait *time series* dalam penelitian ini menggunakan data tahunan,yaitu 2013-2022. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap mutu sumber daya manusia. Artinya, semakin besar belanja pendidikan akan berbanding lurus dengan tingkat mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia. Belanja kesehatan berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia. Belanja ekonomi tidak berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa IPM di Kawasan Timur Indonesia cenderung naik tiap tahunnya di daerah masing masing. Dengan kata lain, pencapaian sasaran pembangunan di Kawasan Timur Indonesia mengalami kemajuan. Nilai IPM tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di daerah tersebut berhasil, sedangkan IPM terendah berada di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci: belanja pendidikan, belania kesehatan, belanja ekonomi, mutu sumber daya manusia





## ABSTRACT

MUH. FAIZAL AZIS. *The Effect of Regional Expenditure on Human Resources Quality in Eastern Region* (supervised by Abd. Rahman Razak and Fatmawati).

The research aims at investigating the relationship between the independent variables, namely the education, health and economic expenditures to have the effect on the dependent variable in this case the human resources quality. With this research, a thesis can be developed which serves to explain, predict and control a phenomenon. The research used the quantitative method. The research was located in 17 provinces in the eastern regions of Indonesia in accordance with the Presidential Regulation Number 2 Year 2015, namely the provinces situated in Eastern Indonesia such as Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara and Papua. The data were analysed using the panel data. The panel data were the combination between the inter-place data (cross section) and inter-time data (time series). In this research, the cross sections used were 17 provinces located in Eastern Regions of Indonesia and the time series in this research used the annual data, namely the data of 2013 – 2022. Based on the results of the research and discussion, the education expenditure has the positive effect on the human resources quality. It means that the greater the education expenditure, the higher the human resources quality. The health expenditure has the influence on the human resources quality, and finally, the economic expenditure has no effect on the human resources quality in Eastern Region of Indonesia. Based on the resume of the analysis, it can be perceived that the Human Development index (HDI) in Eastern Region of Indonesia tends to increase every year in each region, in other words, the target development achievement in Eastern Region of Indonesia has undergone the progress. The highest HDI value is in the Central Kalimantan Province. it can be stated that efforts to build the human life quality in that region is successful, while the lowest HDI is in Central Sulawesi Province and East Nusa Tenggara.

Key words: education expenditure, health expenditure, economic expenditure, human resources quality



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                      | iii       |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....           | iv        |
| KATA PENGANTAR .....                           | v         |
| ABSTRAK .....                                  | viii      |
| ABSTRACT .....                                 | ix        |
| DAFTAR ISI .....                               | x         |
| DAFTAR TABEL .....                             | xiii      |
| DAFTAR GAMBAR .....                            | xiv       |
| <b>BAB I.....</b>                              | <b>1</b>  |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                       | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                      | 1         |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                     | 9         |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                   | 10        |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                  | 10        |
| 1.5. Ruang Lingkup Penelitian .....            | 11        |
| <b>BAB II.....</b>                             | <b>12</b> |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                  | <b>12</b> |
| 2.1 Landasan Teori .....                       | 12        |
| 2.1.1 Mutu Sumber Daya Manusia.....            | 12        |
| 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia.....          | 17        |
| 2.1.3 Konsep Belanja daerah.....               | 23        |
| 2.1.3.1 Belanja Pendidikan.....                | 25        |
| 2.1.3.2 Belanja Kesehatan .....                | 29        |
| 2.1.3.3 Belanja Ekonomi.....                   | 31        |
| 2.3 Tinjauan Empiris .....                     | 34        |
| <b>BAB III.....</b>                            | <b>38</b> |
| <b>KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....</b> | <b>38</b> |
| 2.4 Kerangka Konseptual.....                   | 38        |
| Hipotesis .....                                | 42        |
| .....  | 43        |
| <b>II : PENELITIAN .....</b>                   | <b>43</b> |
| Pendekatan Penelitian .....                    | 43        |



|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| 4.2                              | Lokasi dan Waktu Penelitian .....   | 44        |
| 4.3                              | Jenis dan Sumber Data.....  | 44        |
| 4.4                              | Metode Pengumpulan Data.....  | 44        |
| 4.5                              | Metode Analisa Data.....  | 45        |
| 4.5.1                            | Uji Asumsi Klasik.....  | 48        |
| 4.5.2                            | Uji Hipotesis.....  | 49        |
| 4.6                              | Definisi Operasional Variabel .....   | 51        |
| <b>BAB V .....</b>               |   | <b>53</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b> |   | <b>53</b> |
| 5.1                              | Gambaran Umum Objek Penelitian .....  | 53        |
| 5.2                              | Deskripsi Data.....   | 53        |
| 5.2.1                            | Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia .....                                   | 53        |
| 5.2.2                            | APBD untuk Pendidikan di kawasan Timur Indonesia .....  | 54        |
| 5.2.3                            | APBD untuk Kesehatan di kawasan Timur Indonesia.....  | 55        |
| 5.2.4                            | APBD untuk Ekonomi di kawasan Timur Indonesia .....   | 57        |
| 5.3                              | Estimasi Model.....   | 58        |
| 5.3.1                            | Model Regresi Data Panel .....  | 58        |
| 5.3.2                            | Model Terbaik .....   | 63        |
| 5.4                              | Uji Asumsi Klasik.....  | 65        |
| 5.5                              | Regresi Data Panel .....  | 67        |
| 5.5.1                            | Uji t ( Parsial) .....  | 67        |
| 5.5.2                            | Uji F .....   | 69        |
| 5.5.3                            | Koefisien Determinasi .....   | 70        |
| 5.6                              | Interpretasi .....  | 71        |
| 5.6.1                            | Interpretasi Model Umum .....   | 72        |
| 5.6.2                            | Interpretasi Model Individu .....   | 72        |
| 5.7                              | Pembahasan.....   | 80        |
| 5.7.1                            | Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Mutu Sumber Daya Manusia di Kawasan Timur Indonesia..... | 80        |
|                                  | Pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Mutu Sumber Daya Manusia di Kawasan Timur Indonesia.....  | 82        |
|                                  | Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap Mutu Sumber Daya Manusia Kawasan Timur Indonesia .....      | 84        |



|                            |                  |           |
|----------------------------|------------------|-----------|
| 6.1                        | Kesimpulan ..... | 86        |
| 6.2                        | Saran .....      | 87        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> |                  | <b>88</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       |                  | <b>99</b> |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 5.1 Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model (CEM) .....               | 67 |
| Tabel 5.2 Hasil Regresi Data Panel <i>fixed effect Model</i> (FEM) Individu..... | 68 |
| Tabel 5.3 Hasil Regresi Data Panel <i>fixed effect Model</i> (FEM) Tahun.....    | 69 |
| Tabel 5.4 Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model (REM) .....               | 70 |
| Tabel 5.5 Hasil Uji Chow.....  | 71 |
| Tabel 5.6 Hasil Uji Housmen.....   | 72 |
| Tabel 5.7 Asumsi Prasyarat.....  | 73 |
| Tabel 5.8 Uji Heterokedasitas .....  | 73 |
| Tabel 5.9 Uji Multikolinearitas .....  | 74 |
| Tabel 5.10 Uji t (Parsial) .....   | 75 |
| Tabel 5.11 Uji F .....   | 77 |
| Tabel 5.12 Koefisien Determinasi .....   | 77 |
| Tabel 5.13 Hasil Estimasi Model Terbaik FEM.....                                 | 78 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Perkembangan IPM di Indonesia Tahun 2010-2020 (Indeks).....                           | 10 |
| Gambar 1.2 Perbandingan IPM Seluruh Daerah di Indonesia.....                                     | 11 |
| Gambar 1.3 Belanja Daerah Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Timur<br>Indonesia Tahun 2019..... | 14 |
| Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....   | 48 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tingkat perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya pada tingkat pembangunan (Fadillah & Setiartiti, 2021), pembangunan merupakan suatu proses yang terencana sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar tercapai tujuan nasional. Indonesia saat ini lebih berfokus pada pembangunan manusia (Kahang et al., n.d.), Pembangunan dalam hal ini meliputi pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan (Luther Sirangi Si & Hasid, 2019; Wardhana et al., 2022). Pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya intelektual, spiritual, kesehatan, moralitas dan kesejahteraan ekonomi.

Kualitas sumber daya manusia merupakan permasalahan yang sangat berkaitan dengan masalah pembangunan suatu daerah (Putriani et al., 2018). Hal tersebut didasari bahwa dengan adanya kualitas yang baik akan menyebabkan masyarakat tersebut memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan. (Jean, 2019; M.M Sanggelorang et al., 2015). Diera globalisasi seperti sekarang menuntut manusia untuk melakukan penyesuaian terhadap kemajuan teknologi agar mampu menciptakan kualitas dan cara kerja yang dapat menyelesaikan tantangan dan kendala dalam pembangunan (Ernita, 2022). Oleh

itu kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan.



Pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu proses meningkatkan jumlah masyarakat untuk mendapatkan kompetensi serta pengetahuan yang dibutuhkan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wulan Agustin & Hendrie Anto, 2022). Pengembangan sumber daya manusia bagian dari prioritas pemerintah untuk mendukung program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan, serta dengan alokasi dana yang signifikan. (Fahimi *et al.*, 2018).

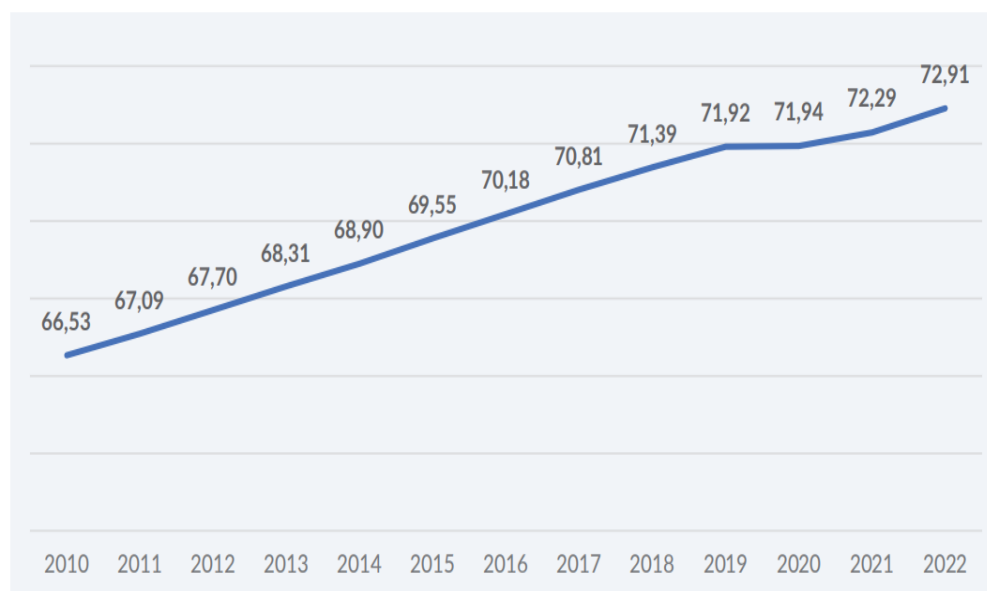
Indikator yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diukur berdasarkan 3 indikator utama yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi (Muslihatinningsih *et al.*, 2023). Pengukuran IPM dilakukan dengan mengukur dimensi dasar yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menunjukkan peringkat pembangunan suatu wilayah ataupun Negara, persentasi dari IPM menjadi gambaran pada tingkat kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur persentasi dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia (Farida *et al.*, 2022). Pembangunan yang dihitung dengan melihat pada besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan ekonomi (Azizah, 2013). Semakin tingginya angka yang didapatkan akan berbanding lurus dengan tujuan pembangunan sebagai bentuk usaha menuju daerah yang lebih baik. Tujuan dasar dari pembangunan yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi disuatu wilayah, Pendidikan merupakan tabungan dasar, kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan adalah cara untuk mencapai kehidupan yang layak (Anggraeni, 2017)





Menurut hasil laporan pembangunan manusia oleh *United Nations Development Programme* (UNDP 2019), Indonesia pada tahun 2018 berada di posisi peringkat 111 dari 189 negara. Peringkat IPM Indonesia ini masih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Perkembangan IPM Indonesia terus mengalami kemajuan, dimana Indeks Pembangunan pada tahun 2015 sebesar 69,55 dan tahun 2019 menjadi 71,92 (lihat Gambar 1). Kenaikan IPM Indonesia bermula dari tahun 2016 yang berkategori sedang menjadi kategori tinggi mulai tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).



Sumber: BPS, 2022

**Gambar. 1.1 Perkembangan IPM di Indonesia Tahun 2010-2020 (Indeks)**





Sumber: BPS, 2022

### Gambar 1.2 PERBANDINGAN IPM SELURUH DAERAH DI INDONESIA

Secara umum setiap tahunnya terjadi peningkatan terhadap indeks pembangunan manusia, di Indonesia sendiri, Indeks pertumbuhan manusia tergolong tinggi. Namun untuk wilayah Timur Indonesia masih berada di kisaran 69 poin dengan indeks terendah di wilayah Papua yakni 61 poin. Terdapat 9 dari total 17 provinsi di wilayah Timur Indonesia memiliki IPM dibawah 70 poin, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kawasan barat Indonesia yang memiliki IPM diatas 70 poin (Badan Pusat Statistik, 2022). Dari hal tersebut dapat dengan jelas dilihat masih adanya ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia menjadi permasalahan yang masih belum terselesaikan.

Secara teoritis salah satu faktor yang dapat mempercepat peningkatan IPM yaitu dengan melihat pada pendapatan daerah perkapita (Arisman, 2018). PDB akan memberikan pengaruh pada tingkat pembangunan yang akan berdampak ya beli masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tingkat n, kesehatan dan ekonomi. Pada hakikatnya peningkatan pada IPM akan



berdampak pada kemajuan suatu negara. Terkait pembangunan ekonomi pada awalnya memandang keberhasilan pembangunan suatu wilayah dengan ukuran tingginya pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek-aspek lainnya, seperti ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya (Fajri, 2021; Luther Sirangi Si & Hasid, 2019). Sumber daya manusia hanya dipandang sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya faktor produksi lainnya yaitu tanah, modal, dan teknologi (Mongan, 2019).

Hakikat APBD yang disusun oleh pemerintah daerah adalah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, sehingga setiap belanja dalam program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus bertumpu pada hal tersebut. Belanja Daerah merupakan bagian utama dalam APBD yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Lebih lanjut, PP nomor 71 tahun 2010 mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-lain/Tak terduga, Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Lainnya.

Menurut Badrudin (2012:21), Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah



m bentuk belanja operasional maupun belanja modal diharapkan akan atkan aktivitas yang memicu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi, diharapkan sejalan dengan peningkatan alokasi pendapatan masyarakat untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut lebih kaya, lebih sehat, dan lebih berpendidikan sebagai indikator pembangunan manusia.

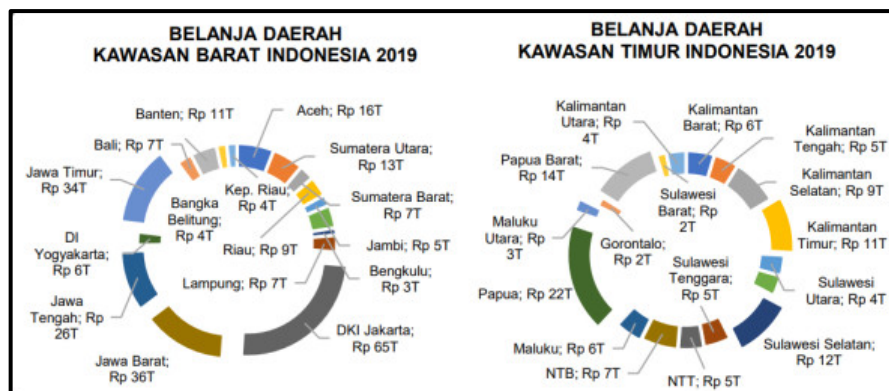
Faktor-faktor yang diukur dalam IPM tentunya sangat terkait dengan peran dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja di dalam program dan kegiatan yang ada di APBD (Muliza et al., 2017; Putriani et al., 2018). Struktur belanja program dan kegiatan dalam APBD sangat berperan dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera. Pengalokasian anggaran belanja ke pos yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan memicu pertumbuhan yang positif pada kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan APBD sendiri tidak terlepas proses politik di daerah antara pihak eksekutif dan legislatif. Adanya tarik-ulur kepentingan atas penganggaran belanja mengakibatkan struktur alokasi APBD bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan peningkatan belanja daerah pada APBD serta pelaksanaan otonomi daerah selama beberapa tahun, ternyata belum tampak perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Ini terlihat jelas pada kebijakan APBD yang menjadi instrumen induk untuk menjalankan fungsi alokasi dan distribusi, dimana alokasi dan realisasi anggaran lebih sering didominasi oleh kepentingan belanja rutin birokrasi, terutama untuk membayar gaji pegawai pemerintah daerah, biaya kantor dan biaya perjalanan dinas. Selain itu sebagian besar anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan atau pengembangan yang lebih fisik (pembangunan gedung). Sehingga pengalokasian anggaran yang



berhubungan dengan peningkatan mutu dan kualitas pembangunan manusia menjadi kurang efektif.

Dalam konteks ini, belanja daerah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan penting untuk pengembangan sumber daya manusia di daerah (M.M Sanggelorang et al., 2015). Namun, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana belanja daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia di daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah yang efektif dapat membantu meningkatkan mutu sumber daya manusia di daerah. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hubungan antara belanja daerah dan mutu sumber daya manusia, termasuk faktor sosial, politik, dan budaya.



Sumber: Kemenkeu, diolah, 2022

**Gambar 1.3 Belanja Daerah Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Timur Indonesia Tahun 2019**

Dalam perbandingan belanja daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), diketahui bahwa rata-rata belanja daerah KBI lebih tinggi dibanding KTI dengan selisih 26 triliun rupiah dan selisih total belanja

ebesar 440 triliun rupiah pada tahun 2019. DKI Jakarta sebagai pusat anhan memiliki porsi belanja yang sangat besar dibanding daerah lain di



KBI yaitu sekitar 66 triliun rupiah diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Belanja 14 daerah lainnya berkisar dari 3 hingga 16 triliun rupiah (lihat Gambar 1.2). Jelas terlihat adanya ketimpangan belanja daerah yang sangat besar antar provinsi di KBI, namun jika dibandingkan dengan Gambar 1.1, walau dengan belanja daerah yang tergolong sedikit, misalnya, Bangka Belitung (hanya 4 triliun rupiah), indeks pembangunan manusianya dapat menyentuh angka 71 poin yang merupakan kategori tinggi (lihat Gambar 1.1) (Badan Pusat Statistik, 2022b).

Kawasan Timur Indonesia sebagai fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terlihat dari porsi belanja yang cukup besar terutama di Papua (22 triliun rupiah pada tahun 2019, hampir setara Jawa Tengah) dan porsi belanja yang cukup merata di setiap daerah (lihat Gambar 1.2). Namun baik di Papua maupun Papua Barat yang merupakan daerah KTI dengan porsi belanja terbanyak, indeks pembangunan manusia pada dua daerah tersebut merupakan yang terendah di Kawasan Timur Indonesia (lihat Gambar 1.1).

Penggunaan belanja daerah untuk meningkatkan mutu SDM masih belum optimal di beberapa daerah di Indonesia Timur. Terdapat beberapa daerah yang masih mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk kepentingan yang kurang efektif dan efisien (Rahman razak, 2011). Masih perlunya penelitian terkait pengaruh belanja daerah terhadap mutu SDM di kawasan Timur Indonesia sangat penting dilakukan karena diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja daerah yang dimiliki agar lebih efektif dan efisien. Namun, beberapa penelitian hanya berfokus pada wilayah Jakarta dan belum mencakup seluruh kawasan

(Prayoga Arrfah. Apri & Syafri, 2022).



Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya pada kenyataannya, masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia di daerah (Nasution et al., 2021). Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Farida et al., 2022). Kualitas mutu sumber daya suatu provinsi akan terlihat pada persentasi alokasi belanja daerah yang dikeluarkan di sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana belanja daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam (Budiyanto, 2019). Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap pengaruh belanja daerah terhadap mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi hubungan tersebut.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah, terutama di kawasan Timur Indonesia, serta dapat menjadi acuan bagi kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia di daerah. (Satriawan, 2020). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Mutu Sumber Daya Manusia Di Kawasan Timur Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:



Apakah belanja pendidikan berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia?

2. Apakah belanja kesehatan berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia ?
3. Apakah belanja ekonomi berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan terhadap Mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja kesehatan terhadap mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja ekonomi terhadap mutu sumber daya manusia di kawasan Timur Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademik, memberikan sumbangsih pengetahuan dan penilaian terhadap pengaruh belanja pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap mutu sumber daya di kawasan Timur Indonesia, lalu memberi masukan terhadap pihak terkait guna mengetahui keadaan perekonomian Indonesia Timur dan juga dapat menambah literatur di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Indonesia Timur, khususnya pada rogram studi ekonomi sumberdaya.





## 2. Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang menyangkut belanja dan belanja daerah terhadap mutu sumber daya. Sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi para peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi mutu sumber daya. Dan Penelitian ini memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi mengenai perkembangan mutu sumber daya khususnya di kawasan Timur Indonesia

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kawasan Timur Indonesia dalam rentang tahun 2013-2022. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap mutu sumber daya yang dipengaruhi oleh belanja pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Belanja pendidikan memiliki kebijakan tersendiri seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, promosi pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan pengembangan budaya baca. Belanja kesehatan dikaji melalui ketersediaan fasilitas kesehatan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Mutu Sumber Daya Manusia

Modal manusia dalam input pembangunan memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari akumulasi modal manusia dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, penciptaan inovasi teknologi yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Wardhana et al., 2022). modal yang dimiliki sumber daya manusia merupakan komponen yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan input produksi suatu negara. Modal negara yang tinggi dilihat dari kualitas pendidikan yang berbanding lurus.

Kualitas dari sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan pada aspek produktifitas kerja dari SDM sendiri. Adanya peningkatan pada mutu sumber daya akan berdampak pada peningkatan produktivitasnya(Azizah, 2013). Kualitas dari sumber daya manusia merupakan subjek dari pembangunan dimana dapat menentukan tinggi atau rendahnya produktifitas. Singkatnya kualitas dari sumber daya manusia merupakan cerminan pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut Tjiptoherijanto, faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat adalah faktor ekonomi, pendidikan dan kesehatan(Amiral et al., 2020).

Terkait tolak ukur dari peningkatan mutu sumber daya dapat dilihat dari indikator komposit objektif yang dikenal dengan istilah indeks mutu hidup (IMH).



merminkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang terdiri dari tiga n yaitu: Pertama, angka melek huruf. Kedua, angka harapan hidup. angka kematian bayi. Selain itu gambaran mengenai kualitas sumber daya

manusia sebagai faktor yang paling dominan dalam pembangunan dapat diukur juga dengan menggunakan pendekatan Indeks. Menurut Ventegodt integrasi kualitas hidup merupakan suatu objek yang dipandang secara objektif dan subjektif, dimana kualitas dari segi objektif dilihat dari kebutuhan biologis, kebutuhan pokok dan potensi diri yang dikembangkan berdasarkan pada aturan dan norma yang berlaku sedangkan kualitas hidup secara subjektif dilihat dari sudut pandang seseorang memaknai persoalan hidup, kebahagiaan, keputusasaan dan kesejahteraan yang dirasakan masing- masing orang(Azizah, 2013).

Pengukuran kualitas hidup dilihat dari aspek kesehatan yaitu dari jumlah kematian bayi dan ibu, angkat harapan hidup, jumlah kamar dirumah sakit dan besarnya dana kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, selain itu dilihat dari aspek pendidikan yaitu angka partisipasi pada sekolah dasar, menengah dan jumlah melek huruf dan kemudham masyarakat dalam mengakses pengetahuan. Hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dalia dan Algirdas bahwa kualitas hidup di Lithyania lebih kepada keamanan disektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur dan tenaga kerja. Dimana pemenuhan akan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah termasuk mengenai keamanan yang diberikan pada masing- masing individu(Fadillah & Setiartiti, 2021).

Dengan adanya ketercapaian dari berbagai aspek akan berdampak pada tingkat kualitas sumber daya. Pengukuran mengenai kualitas hidup dapat dilihat dari indeks kualitas hidup. United Nations Development Programme (UNDP),



hidup diukur dengan dengan melihat aspek kesehatan, pendidikan, hidup yang dilihat dari produk domestik bruto, dimana cara ini juga n di Indonesia.

Kualitas sumber daya adalah menyangkut hal-hal diantaranya yakni ; mutu sumber daya manusia, kemampuan (kemampuan fisik maupun non fisik). Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir dan keterampilan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan non fisik yang dimaksud, maka usaha yang dilakukan adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia (Notoadmojo, 2003).

Pengembangan kualitas sumber daya manusia sendiri adalah upaya pengembangan manusia untuk hal-hal yang menyangkut pengembangan aktifitas dalam bidang pendidikan, latihan, kesehatan dan gizi. Pengertian ini memusatkan pada pemerataan dalam meningkatkan kemampuan manusia dan pada pemanfaatan kemampuan tersebut (Sein, 2009).

Menurut Mulyadi S., kebijaksanaan dalam peningkatan kualitas hidup antara lain meliputi :

- 1) Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan pelayanan kesehatan terutama pada penduduk terpencil.



Untuk penduduk miskin, peningkatan kualitas dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta

mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepas diri dari kemiskinan.

- 4) Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana, serta meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk antara lain melalui transmigrasi dan industri di pedesaan (Freshka, 2015).

Selain dari pada itu ada beberapa hal yang dilakukan dalam konteks pengembangan SDM guna untuk meningkatkan kualitasnya, Seperti yang di ungkap oleh *Bilson Simamora* mengenai tahapan-tahapan pengembangan SDM, yakni :

- 1) Tahap pertama : Tahapan pengembangan SDM dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan pengembangan. Dalam tahap ini digali proses pengembangan apa yang paling cocok bagi individu tertentu dengan melakukan assesment mengenai strenghts dan areas for development dari tiap individu (karyawan). Assesment dapat dilakukan dengan melalui pola assessment center atau juga melalui observasi dan evaluasi dari atasan masing-masing (cara ini lebih praktis dibanding harus menggunakan assessment center).
- 2) Tahap kedua: dari hasil assesment, langkah selanjutnya merumuskan program pengembangan apa yang cocok bagi karyawan yang bersangkutan. Dalam perumusan program pengembangan hasil assesment ini tidak hanya didasarkan pada kelemahan karyawan, namun justru harus lebih bertumpu pada kekuatan yang dimiliki oleh karyawan tersebut (pendekatan semacam ini disebut sebagai strenght-based development). Jenis program atau proses pengembangan yang



disusun juga tidak mesti harus berupa training di kelas. Ada banyak alternatif program pengembangan lain seperti: 1) Mentoring (karyawan yang dianggap senior dan memiliki keahlian khusus menjadi mentor bagi sejumlah karyawan lainnya, 2) Project/special assignment (penugasan khusus untuk menambah job exposure), 3) Job enrichment (memperkaya bobot pekerjaan), 4) On-the-job training.

- 3) Tahapan ketiga adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan yang telah disusun. Dalam fase ini, setiap progres pelaksanaan program dimonitor efektivitasnya dan kemudian pada akhir program dievaluasi dampaknya terhadap peningkatan kinerja karyawan yang bersangkutan, dan juga pada kinerja bisnis.

Serangkaian tahapan tersebut, mulai dari fase identifikasi, fase penyusunan program pengembangan dan fase monitoring/evaluasi, sebaiknya dilakukan dalam mekanisme yang sistematis dan terstandar. Sebaiknya disusun juga semacam buku panduan lengkap untuk melakukan serangkaian proses di atas, disertai tools yang diperlukan. Dengan demikian, setiap manajer atau karyawan paham akan apa yang mesti dilakukan. Agar pengembangan SDM berjalan dengan baik harus ada pengelola dari departemen SDM yang bertugas khusus untuk memastikan bahwa serangkaian proses di atas dapat dilakukan dengan benar dan tertib. Pola semacam inilah yang harus dilakukan jika perusahaan / organisasi yang anda pimpin benar-benar ingin mendayagunakan potensi setiap SDM-nya secara

al (Ruhana, 2012).



### 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Persepsi terhadap pembangunan manusia telah mengalami perubahan yang penting seiring berjalannya waktu, mulai dari perspektif kuno hingga pemikiran modern saat ini. Pada zaman kuno, fokus utama pembangunan manusia hanya pada pemenuhan kebutuhan fisik seperti pangan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup manusia (Sen, 1999). Pada era abad pertengahan, pembangunan manusia lebih berorientasi pada perkembangan spiritual dan moral dengan harapan mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat (Alatas, 1977). Pada masa Pencerahan, pembangunan manusia lebih menekankan kemajuan intelektual dengan tujuan menciptakan masyarakat yang terdidik dan rasional. Pada awal era modern, perhatian pembangunan manusia mulai beralih ke kemajuan ekonomi dengan tujuan meningkatkan standar hidup manusia (Sen, 1999). Namun, saat ini, konsep pembangunan manusia semakin berkembang dan meluas dalam pandangannya, dengan tujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan keadilan sosial (UNDP, 2022).

Faktor-faktor internal bukanlah satu-satunya yang memengaruhi perkembangan manusia. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat juga memiliki peran penting dalam hal ini. Revolusi industri, yang mengubah cara hidup dan bekerja manusia secara drastis, merupakan salah satu perubahan yang paling signifikan dalam sejarah perkembangan manusia. Perang dunia dan konflik internasional lainnya juga memiliki dampak negatif terhadap perkembangan manusia melalui kerusakan infrastruktur, kehilangan



sumber daya, dan kerugian manusia lainnya. Di sisi lain, globalisasi tidak hanya membuka pasar dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi, tetapi juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin besar antara negara maju dan negara berkembang. Perubahan iklim juga memiliki peran penting dalam perkembangan manusia, karena menghadirkan ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan manusia, terutama dalam hal sumber daya alam, kesehatan manusia, dan keamanan pangan (Beneria, 2016).

Sejarah perkembangan manusia menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi kemajuannya, baik secara positif maupun negatif. Meskipun ada tantangan seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, konflik, dan pandemi yang terus menjadi hambatan bagi pencapaian pembangunan manusia yang berkelanjutan, namun tantangan tersebut tidak secara langsung menghalangi pemanfaatan peluang seperti kemajuan teknologi dan kesadaran manusia.

Proses yang memperhatikan penciptaan lingkungan yang mendukung dimana manusia dapat mengembangkan potensi dan berperan produktif secara penuh serta hidup kreatif berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan (Ayu Trisna dewi & Suyana Utama, 2019). Konsep luas dengan banyak dimensi merupakan cara memperluas pilihan manusia diantara dimensi kritis dan paling dasar adalah hidup sehat dan panjang, mempunyai akses ke ilmu pengetahuan, dan standar hidup layak (Kahang et al., 2016a). Tanpa dimensi dasar ini, maka dimensi yang lain seperti kebebasan politik, kemampuan untuk berpartisipasi dalam komunitas, dan lain-lain tidak dapat dicapai. Pembangunan manusia bukan hanya tentang pencapaian tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan fondasi yang kuat di sekeliling manusia, bukan manusia disekeliling pembangunan.





Pembangunan manusia memiliki dua sisi: pertama, fungsi dari keberdayaan manusia dan kedua, pemakaian keberdayaan itu untuk keseimbangan kehidupan dan tujuan produk (Wulan Agustin & Hendrie Anto, 2022)i.

Menurut United Nations Development Program (UNDP), dalam pembangunan manusia terdapat aspek penting yang dapat menjadi prioritas utama, seperti (Nasruddin & Azizah, 2022) :

1. Prioritas dalam pembangunan harus diberikan kepada penduduk agar mereka menjadi sumber keunggulan.
2. Rencana pembangunan bertujuan untuk memenuhi keinginan penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan penghasilan mereka.
3. Pembangunan manusia bertujuan untuk optimalisasi dan pemanfaatan potensi manusia secara maksimal.
4. Pembangunan manusia diperkuat oleh empat prinsip utama, yaitu: (a) Daya produksi, di mana penduduk perlu meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi aktif dalam mendapatkan penghasilan; (b) Kesetaraan, di mana penduduk harus memiliki akses yang adil terhadap peluang; (c) Keberlanjutan, di mana penduduk harus dipastikan mendapatkan kesempatan di generasi mendatang; (d) Pemberdayaan, di mana masyarakat harus berperan penuh dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka; (e) Pembangunan manusia menjadi dasar untuk menetapkan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan-pilihan yang dapat mengwujudkannya.

Menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang



perhatikan adalah produktivitas, penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan

pendapatan dan nafkah. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya yang tidak seluruhnya dapat diukur seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, dan pemerataan antar generasi dalam masyarakat

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak (Yogi Hidayat & Azhar, 2022). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) (Amiral et al., 2020; Firman Alamsyah et al., 2022).

IPM kemudian disempurnakan oleh United Nation Development Programme, alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran keberhasilan dari pembangunan. (Badan Pusat Statistik, 2022) Sehingga ukuran bobot manusia saja tidaklah cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan dengan kondisi fisik dan non fisik manusia (Mohamad Yamin Latuconsina, 2017). Alasannya pembangunan manusia adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari peningkatan kesehatan, keahlian dan ilmu pengetahuan.



merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari tiga yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas

pilihan-pilihan, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standart hidup layak. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah (Gde Putra Mahendra & Ketut Ulupui Agung, 2015). Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsure pembangunan yang sangat penting.

Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Untuk mendukung aspek pendidikan dan kesehatan dibutuhkan anggaran. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan aspek pendidikan dan kesehatan melalui belanja daerah. Belanja daerah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting diantaranya sektor pendidikan dan sektor kesehatan.

Adapun komponen-komponen IPM menurut UNDP dikutip sebagai berikut:

#### 1. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan an tidak langsung (*Indirect Estimation*). Ada dua jenis data yang



digunakan dalam penghitungan Angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (187 negara di dunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP.

## 2. Tingkat pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*Mean Years Schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Ratarata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.



### 3. Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi sedangkan BPS dalam memperhitungkan standar hidup layak menggunakan rata-rata belanja per kapita riil.

IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

#### 2.1.3 Konsep Belanja daerah

Pengeluaran pemerintah menurut Mangkoesoebroto merupakan cerminan kebijakan pemerintah lakukan, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Sudartomo, 2014). Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah.



pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan belanja daerah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah

untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai belanja daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan belanja daerah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan belanja daerah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman (Mangkoesubroto, 2013).

Belanja daerah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja daerah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Sukirno, 2012).

Belanja daerah secara makro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar (Nicholson, 2002). Semakin banyak belanja daerah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat. Sejalan yang di katakana Musgrave, jika pendapatan perkapita meningkat maka secara relative belanja daerah akan meningkat. Belanja daerah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas pendapat lain dalam meningkatkan perilaku perkembangan belanja daerah.

Dalam konteks belanja daerah, terdapat dua jenis yang berbeda, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja daerah tidak langsung meliputi pengeluaran untuk pegawai, pembayaran bunga, subsidi, hibah, sosial, pembagian hasil kepada Provinsi/Kabupaten, dan pemerintah



desa. Sementara itu, belanja daerah langsung mencakup pengeluaran untuk pegawai, barang dan jasa, serta investasi dalam bentuk belanja modal seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik. Dalam sistem anggaran pemerintah di Indonesia, terdapat dua jenis belanja yang dikenal, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin digunakan untuk membiayai operasional pemerintah, termasuk di dalamnya pembayaran gaji pegawai. Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran yang terklasifikasi sebagai belanja pemerintah yang mengarah pada investasi, salah satunya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi (Chandra, 2022).

#### 2.1.3.1 Belanja Pendidikan

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya secara jelas dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak ini lebih lanjut dijelaskan oleh pasal 31 (2), yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayainya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terutama pendidikan dasar, dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendidikan pada dasarnya merupakan hak yang mendasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dinikmati (Amelia et al., 2019).

Pendidikan merupakan investasi yang akan selalu berdampak pada waktu yang akan datang. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan bangsa. Pemerintah harus menyediakan alokasi belanja

untuk pendidikan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan investasi dalam membentuk modal



manusia (human capital). Modal manusia merupakan investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan gagasan (Todoro & Semith, 2011). Hal ini merupakan komponen penting dalam rangka mendukung program pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dengan skema benefit spillover. Besarnya belanja pendidikan akan menentukan seberapa besar pencapaian hasil pembangunannya

Untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan adanya investasi sumber daya manusia (*human investment*) sehingga dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat. Suatu daerah dapat diukur kemajuannya berdasarkan indikator pendidikan. Jika tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi maka akan semakin besar peluang masyarakat masuk kedalam dunia kerja. Dengan pendidikan yang tinggi, masyarakat mampu untuk meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui peningkatan produktivitas. Pendidikan adalah salah satu aspek penting bagi proses pembangunan karena berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan manusia. Hampir setiap negara memprioritaskan pembangunan pendidikan dalam program pembangunan nasionalnya karena hal ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan suatu negara. Pembangunan pendidikan dari tingkat daerah hingga nasional harus dapat menjamin peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan guna menghadapi tantangan kedepannya sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal maupun nasional (Dianaputra & Aswitari, 2017).

Dalam buku Iktisar Data Pendidikan Indonesia untuk negara Indonesia, Kementerian Pendidikan telah menetapkan beberapa capaian indikator dalam pendidikan. Beberapa indikator tersebut mencakup indikator masukan, hasil antara, dan indikator hasil akhir. Indikator masukan (input) diukur





melalui pembiayaan pendidikan, penyediaan fasilitas pembelajaran bagi masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia termasuk tenaga pengajar. Indikator hasil antara (intermediate output) diukur melalui angka naik kelas, angka lulus, rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN), dan persentase akreditasi sekolah. Sementara itu, indikator hasil akhir (outcomes) adalah hasil jangka panjang dari seluruh proses pendidikan yang meliputi input, intermediate output, dan outcomes. Indikator hasil akhir (outcomes) diukur melalui angka melanjutkan (AM), angka melek huruf, angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), rata-rata lama sekolah, dan angka putus sekolah (APTS) (Amelia et al., 2019).

Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan publik di sektor pendidikan, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan keempat pada ayat (4), disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas anggaran pendidikan setidaknya sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, yang menegaskan bahwa pemerintah harus mengalokasikan minimal 10% dari APBN dan 20 persen dari APBD sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Tujuan alokasi anggaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Penjelasan lebih rinci mengenai alokasi anggaran pendidikan tertuang dalam Pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003, yaitu dana pendidikan yang

hal-hal selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus



dialokasikan minimal 10% dari APBN untuk sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD (Anshari, 2014).

Dengan adanya tanggung jawab untuk mengalokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan, diharapkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia akan meningkat. Walaupun Undang-Undang menetapkan persentase tersebut, situasi di lapangan dalam dunia pendidikan di Indonesia sangat bertentangan dengan alokasi anggaran yang tinggi tersebut. Dikutip dari *idntimes.com*, survei yang dilakukan oleh World Top 20 Education Poll terkait peringkat pendidikan terbaik di dunia dengan data statistik yang dikumpulkan dari 6 organisasi internasional dan dipublikasikan melalui situs *worldtop20.org* berdasarkan klasifikasi : tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini, tingkat penyelesaian sekolah dasar, tingkat penyelesaian sekolah menengah, tingkat kelulusan SMA, dan tingkat kelulusan perguruan tinggi menempatkan Indonesia pada peringkat ke-67 dari 203 negara.

Kemajuan perekonomian suatu daerah dapat diwujudkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengetahuan, bilamana daerah tersebut mempunyai modal manusia yang kuat dan berkualitas, akumulasi modal manusia seperti halnya modal fisik merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan dalam hal ini dipengaruhi oleh program-program pemerintah dalam pembangunan. Berkaitan dengan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi, pendidikan tersebut sebagai modal manusia (*human capital*) dan belanja daerah terhadap pendidikan disebut sebagai investasi dalam modal manusia (*investing in capital*). Pendidikan berkenaan dengan pembangunan serta keahlian dan nilai dari manusia dalam proses pembangunan (Jhingan, 2016).



### 2.1.3.2 Belanja Kesehatan

(Kuncoro, 2013) menyatakan bahwa belanja kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Melihat kualitas manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

(Anurogo & Suarni, 2018) menyusun program yang bertajuk MELINESIA. MELINESIA merupakan program yang terdiri dari 3-S yaitu sehat jasmani, sehat ekonomi, dan sehat literasi. Program ini bertujuan untuk memberdayakan semua elemen masyarakat, menciptakan generasi yang berkemajuan, serta meningkatkan derajat kesehatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan masyarakat yang mandiri, sehat dan unggul, baik dari aspek jasmani, ekonomi, maupun literasi.

(Todaro & Smith, 2006) menyatakan bahwa belanja kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. (Sanggolongan et al., 2015) menyatakan bahwa belanja kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa

anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah



provinsi dan Kabupaten/Wilayah dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Menurut teori ekonomi publik, belanja kesehatan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, efisiensi alokasi sumber daya harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan manfaat kesehatan bagi masyarakat. Hal ini melibatkan pemilihan proyek-proyek atau program-program yang memberikan manfaat kesehatan yang paling besar dengan biaya yang paling efisien. Kedua, teori ekonomi publik menekankan pentingnya kriteria keadilan dalam belanja kesehatan. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan distribusi manfaat kesehatan yang adil bagi seluruh penduduknya. Hal ini berarti bahwa sumber daya harus dialokasikan secara adil, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan membayar masyarakat yang berbeda (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Selain itu, teori ekonomi publik juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan belanja kesehatan. Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan, serta memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang berkaitan dengan belanja kesehatan (WHO, 2010).

Belanja kesehatan merupakan salah satu dasar keberhasilan pembangunan nasional, dengan indikator meningkatnya angka usia harapan hidup masyarakat di suatu negara tentu dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi yang memadai sehingga dapat memperpanjang usia harapan



. Angka harapan hidup mencerminkan rata-rata hidup yang dijalani oleh g di suatu negara. Dengan mengetahui tingkat harapan hidup

masyarakat, dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dan kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah berarti bahwa kesejahteraan sosial di suatu negara rendah yang berdampak pada masalah kesehatan dan kemiskinan (Widodo et al., 2015). Rata-rata harapan hidup Indonesia pada tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik ialah 69,9 tahun untuk pria dan 73,8 tahun untuk wanita. Angka harapan hidup penduduk Indonesia dari tahun ke tahun cenderung stagnan di angka 68 tahun, dan masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Dalam konteks harapan hidup dan kesehatan, salah satu indikatornya juga dapat dilihat dari kinerja pemerintah Indonesia, terutama dalam upaya pengurangan jumlah tingkat kematian bayi. Hal ini dipandang perlunya keterjangkauan akses terhadap sarana kesehatan, seperti ketersediaan puskesmas dan rumah sakit yang menjadi tempat persalinan yang baik bagi ibu dan bayinya. Selain itu, penambahan tenaga kesehatan yang tersedia juga ikut andil dalam penurunan tingkat kematian bayi (Widodo et al., 2015).

Selain angka harapan hidup dan tingkat kematian bayi, indikator lain yang dapat menjadi gambaran tingkat capaian kesehatan masyarakat adalah sejauh mana tingkat ekspektasi hidup sehat. Hidup sehat di sini dapat diartikan sejauh mana rata-rata umur seseorang yang hidup dalam keadaan sehat dan terhindar dari masalah kesehatan. Hal ini berkaitan langsung dengan sejauh mana masyarakat dapat terbebas dari berbagai penyakit serta kualitas dari layanan kesehatan yang memadai (Widodo et al., 2015).

#### 2.1.3.3 Belanja Ekonomi



Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari belanja ekonomi secara agregat dapat dilihat dari investasi pemerintah

dalam negeri dan dari luar negeri atau juga dari swasta yang rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Sebaliknya apabila suatu sektor investasi mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap totalitas perekonomian maka sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus akan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Belanja daerah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian.

Anggaran belanja daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan demikian APBD harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah (Halim, 2001). (Yusuf, 2004) mengatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Belanja pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Belanja ekonomi merupakan investasi pemerintah karena

ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, beasiswa bantuan



untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai belanja pemerintah atas produk nasional karena belanja tersebut untuk membeli barang dan jasa (Sukirno, 2015).

Belanja daerah yang berupa investasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan barang atau jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal, investasi masyarakat atau swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Subandi, 2014)

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Belanja Pendidikan terhadap Mutu Sumber Daya Manusia**

Asumsi yang digunakan dalam Teori *Human Capital* adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat (Subandi, 2014). Investasi mutlak dilakukan pada sektor pendidikan, dimana disetiap anggaran belanja harus mengalokasikan 20% terhadap sektor pendidikan (Mahuze et al., 2022). Hasil penelitian (Palayukan, 2019) disimpulkan bahwa belanja daerah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Alokasi anggaran pendidikan yang memadai dapat menunjang penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan program-program pendidikan baik yang berasal dari program pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan manusia.



### 2.2.2 Hubungan Belanja Kesehatan terhadap Mutu Sumber Daya Manusia

Kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi manusia, tanpa kesehatan penduduk/masyarakat tidak akan menghasilkan suatu produktivitas bagi negaranya, dan apabila ada jaminan kesehatan bagi masyarakatnya maka kegiatan ekonomi akan berjalan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Soleha & Fathurrahman, 2017), dengan adanya pembangunan sarana publik serta peningkatan kualitas bidang kesehatan merupakan penunjang berjalannya kegiatan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi Belanja daerah Bidang Kesehatan akan meningkatkan IPM di Indonesia.

### 2.2.3 Hubungan Belanja Ekonomi terhadap Mutu Sumber Daya Manusia

Hukum Wagner mengemukakan tentang perkembangan belanja daerah yang semakin besar terhadap PDB yang didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, U.S dan Jepang pada abad ke-19. Menurut Wagner dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif belanja daerah pun akan meningkat. Sedangkan teori Peacock dan Wiseman berisi tentang perkembangan belanja daerah yang terbaik. Menurut mereka meningkatnya pendapatan nasional menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar dan begitu juga dengan belanja daerah menjadi semakin besar (Mangkoesubroto, 2013).

## 2.3 Tinjauan Empiris

Berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh terhadap pembentukan IPM dan tingkat an. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kajian penelitian terdahulu. Penelitian (Kahang et al., 2016b) menunjukkan bahwa sektor belanja daerah an ( $X_1$ ) secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia





(Y) di Kabupaten Kutai Timur. Sektor pengeluaran kesehatan pemerintah ( $X_2$ ) tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah menunjukkan sektor pengeluaran kesehatan ( $X_2$ ) belum cukup menyadari dengan baik sehingga tidak cukup kuat mendorong indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian dari belanja pendidikan ( $X_1$ ) efek dominan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian (Dianaputra & Aswitari, 2017) menunjukkan bahwa pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kualitas manusia. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks kualitas manusia memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia. Pengaruh tidak langsung tersebut ditunjukkan dengan variabel indeks kualitas manusia merupakan sebagai variabel intervening.

Penelitian (Putri et al., 2018) menunjukkan bahwa Belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB di Wilayah Indonesia Timur, sedangkan sektor infrastruktur secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM namun secara tidak langsung melalui PDRB tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian (Mongan, 2019) menunjukkan bahwa Pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

laerah pusat dalam sektor kesehatan dan belanja daerah daerah dalam



pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara belanja daerah daerah di sektor kesehatan memiliki efek negatif dan signifikan.

Penelitian (Paramita, 2020) menunjukkan bahwa Hanya variabel Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan bidang pendidikan (X1) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y), dengan tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan ketiga variabel lainnya yaitu Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan bidang kesehatan, DAK sektor pendidikan dan DAK sektor Kesehatan, tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Indonesia Timur.

Penelitian (Damanik & Sidauruk, 2020) menunjukkan bahwa variabel Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2017. Variabel PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variable kemiskinan di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2017. Variabel Jumlah Penduduk dan PDRB secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2017.

Penelitian (Fadila & Marwan, 2020) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti semakin meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia maka tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat semakin menurun. Begitupun sebaliknya saat nilai indeks pembangunan manusia menurun akan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak



berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan di Provinsi

Sumatera Barat semakin menurun. Begitupun sebaliknya saat pertumbuhan ekonomi manurun akan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat.

Pada Jurnal *Economia* dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Bhakti dan Agus Setiawan (2013) Penelitian menemukan bahwa *PDB* dan *PPN* secara signifikan mempengaruhi *IPM*. Hasil estimasi model ECM menunjukkan bahwa *PDB*, *PPN*, dan krisis ekonomi tahun 2008 mempengaruhi *IPM*, meskipun *PPN* hanya mempengaruhi dengan tingkat signifikansi 10%. Seperti diharapkan, *PDB* berpengaruh positif terhadap *IPM*, karena peningkatan *PDB* akan memperbaiki kesejahteraan penduduk. Seperti diharapkan juga, *PPN* berpengaruh negatif terhadap *IPM* karena peningkatan pajak pemerintah mengurangi *disposable income*, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. *DD* tidak berpengaruh secara positif terhadap *IPM* yang berarti bahwa desentralisasi pemerintahan belum mampu diterjemahkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

